

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP NOTARIS
SEBAGAI PEJABAT UMUM**

TESIS

NINA TANIA RAHAYU

0806427524



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI – 2010**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP NOTARIS
SEBAGAI PEJABAT UMUM**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

NINA TANIA RAHAYU

0806427524



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI – 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, data semua sumber baik yang dikutip maupun rujukan telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Nina Tania Rahayu

NPM : 0806427524

Tanda Tangan :

Tanggal : 30 Juni 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Nina Tania Rahayu
NPM : 0806427524
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Notaris
Sebagai Pejabat Umum

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Akhiar Salmi, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Pieter E. Latumeten, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 30 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada ALLAH S.W.T atas berkah, rahmat, karunia, taufik, hidayah, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa banyaknya kekurangan dan hasil yang masih jauh dari sempurna yang tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman penulis baik dari segi materi maupun bahasanya yang tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, dirasa sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Akhlar Salmi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, membantu, mengarahkan serta bimbingannya yang sangat berguna kepada penulis selama menyusun tesis ini hingga selesai.
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Bapak Pieter E. Latumeten, S.H., M.H., dan Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., penguji dalam sidang tesis yang telah memberikan masukan bagi kesempurnaan tesis ini.
4. Para dosen pengajar di lingkungan Magister Kenotariatan di FH-UI yang telah banyak memberikan ilmu maupun pengalaman-pengalamannya menjadi Notaris, semoga apa yang telah penulis pelajari dan pahami dapat penulis amalkan sebagai bekal penulis menjadi Notaris kelak.
5. Keluarga, Papa Drs. Dadang Sutisna dan Mama Ennie Susiati, BA atas doa, kesabaran dan kepercayaannya selama ini, semoga penulis dapat menjadi kebanggaan papa mama. Serta adik-adik, Ipsyana Kemala Andriani, S.Ked., Syeni Zahra Septarani, dan Khanzsa Zakiah yang

banyak memberi dukungan kepada penulis dalam segala hal. Penulis sangat beruntung mempunyai dan menjadi bagian dari keluarga ini.

6. H. Mohammad Syahrir Pusadan, S.Kom., yang telah banyak membantu dan memberi dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Sahabat-sahabat penulis, Oi, Devi, Ehnik, Fani, Mincay, Vina, Shinta dan Refa yang selalu memberikan dukungan, berbagi suka dan dukanya selama 8 tahun terakhir ini.
8. Teman-teman seperjuangan dalam Magister Kenotariatan, Virany, Amel, Tania, Feby, Atik, Bang Ro, Jafron, Patar, akhirnya kita lulus juga, semoga kita bisa jadi Notaris yang baik dan sukses ya. Amien.
9. Seluruh staff sekretariat Magister Kenotariatan di FH-UI, terima kasih atas kesediaannya selama 2 tahun ini memberikan informasi yang dibutuhkan.
10. Dan seluruh pihak, baik itu keluarga, sahabat-sahabat maupun teman-teman yang maaf apabila tidak dapat disebutkan satu-persatu dalam tesis ini, tanpa dukungan dan bantuan dari kalian semua, tidaklah mungkin penulis dapat menyelesaikan ini semua dengan lancar.

Depok, 30 Juni 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nina Tania Rahayu
NPM : 0806427524
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP NOTARIS
SEBAGAI PEJABAT UMUM**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 30 Juni 2010
Yang menyatakan,

(Nina Tania Rahayu)

ABSTRAK

Nama : Nina Tania Rahayu
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum

Tesis ini membahas mengenai penerapan sanksi pidana yang dikenakan kepada seorang Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Notaris yang ruang lingkup kewenangannya dibidang hukum perdata tidaklah terlepas dari sanksi pidana, selain sanksi administrasi yang telah diatur sebelumnya dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan sanksi perdata. Notaris dapat dikenakan sanksi dalam hukum pidana dengan dakwaan pemalsuan terhadap akta otentik yang dibuatnya. Tetapi sampai saat ini banyaknya Notaris yang tidak mengetahui atau memahami sanksi-sanksi yang akan mereka hadapi dalam kewenangannya membuat akta otentik, khususnya sanksi pidana karena peraturan perundang-undangan yang mengaturnya kurang jelas, sehingga penulis membahas mengenai penerapan sanksi pidana terhadap Notaris secara jelas. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dimana data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh kasus dalam penulisan ini hanya sebagai gambaran bagaimana sanksi pidana dapat dikenakan bagi seorang Notaris. Berdasarkan penelitian dan teori-teori yang berkaitan dengan penulisan ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa Notaris dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana yang menyangkut kewenangannya membuat akta otentik. Apabila penyidik, penuntut umum atau hakim ingin melakukan pemeriksaan terhadap Notaris beserta aktanya, maka harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Oleh karena itu, perlu adanya kecermatan dan ketelitian Notaris dalam membuat akta otentik agar dikemudian hari tidak ada masalah hukum yang timbul. Selain itu, pengaturan sanksi dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, juga perlu diperjelas.

Kata kunci : Sanksi pidana terhadap Notaris, Pemalsuan akta otentik, Pejabat umum.

ABSTRACT

Name : Nina Tania Rahayu
Study Program: Magister of Law specializing in Notary Studies
Title : Imposing Criminal Sanction on Notary as Public Official

This thesis brings up the topic on imposing a criminal sanction to Notary as a public official who has the authority to draw up authentic deed, which is a perfect evidence. Within his/her authority in the private law, Notary is not spared/immune from criminal sanction, aside from the administrative sanction which is previously stipulated in the Law number 30 year 2004 regarding Notary and civil sanction. Notary may be charged by criminal sanction on the written statement (indictment) of giving false statement (misrepresentation) in his/her authentic deed. However, until this moment, a large number of Notary has no knowledge or understand the sanctions that they may be facing in connection to their incumbent authorization to draw up authentic deed, especially the criminal sanction because the provisions that are related are considered vague, hence the written intents to indulge oneself to explain the criminal sanction towards Notary more vividly. The method in writing used in this thesis is the normative juridical research and prevailing law and regulations. This case study in this thesis is only to provide a picture on how a criminal sanction can be imposed to a Notary. Based on the research and related theories, the writer can conclude that Notary can be imposed criminal sanction if proven guilty in criminal act related to the incumbent authority in drawing up authentic deeds. If the investigator, the public prosecutor or the judge intent to make an investigation towards a Notary based on his/her deeds, an approval from the District Supervisory Magistrate must be obtained. As a result, Notary need to be diligent and smart in drawing up authentic deeds in the future as to prevent any problem to arise. Aside from that, the provision regarding the sanctions in the Law number 30 year 2004 regarding the Notary needs to be made much clearer.

Keywords : Criminal sanctions towards Notary, Misrepresentation of an authentic deed, Public Official.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Maksud dan Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	6
E. Sistem Penulisan	8
II. PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM	9
A. Notaris Sebagai Pejabat Umum	9
1. Pengertian	9
2. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris Sebagai Pejabat Umum	15
3. Akta Otentik Sebagai Produk Hukum Notaris	24
B. Sanksi Pidana Terhadap Notaris	37
1. Pasal-pasal Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)	38
2. Batasan Pidanaan Notaris	48
3. Tata Cara Pemanggilan Notaris Dalam Kasus Pidana	53
C. Penerapan Sanksi Pidana	56
1. Kasus Nomor 880/PID.B/2006/PN.JKT.PST	56
2. Pengenaan Sanksi Pidana Terhadap Seorang Notaris	65

3. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum	69
III. PENUTUP	74
A. Simpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR REFERENSI	xi

